

# ORIENTASI KERAKYATAN TNI DALAM KONTEKS INTEGRASI BANGSA

Agus Widjojo\*

*Sebagai salah satu mata agenda reformasi bangsa, Pemilu 1999 kini telah memasuki tahap penghitungan suara, yakni suatu tahap yang sangat rentan dengan berbagai isu dan kerawanan-kerawanan politis. Dengan melihat dan mencermati hasil penghitungan sementara, maka serta merta diikuti oleh perhitungan-perhitungan politik oleh para elit politik, terutama dalam saat pemilihan presiden RI ke-4.*

*Berangkat dari alasan, dan tentunya kepentingan-kepentingan politik tertentu, maka terjadi polarisasi pemikiran para elit politik, pengamat dan pemerhati politik, dalam menyikapi calon-calon presiden yang dimunculkan oleh partai politik peserta pemilu, terutama 5 (lima) besar.*

*Berbagai isu politik dilontarkan dan mengemuka pada setiap pemberitaan media masa kita, baik cetak maupun elektronik. Demikian halnya, di tengah-tengah siap netralis TNI dalam kehidupan politik, terutama pada Pemilu 1999, netralis TNI ditafsirkan secara berbeda-beda, yang semua patut diduga ada yang dikaitkan dengan kepentingan-kepentingan politik tertentu.*

Menyadari atas realitas politik paska pemungutan suara tersebut, terlebih jika dikaitkan dengan tingginya mobilitas sentimen massa terhadap ketokohan figur nampaknya menjadi tidak berlebihan jika diantisipasi dapat memunculkan ledakan emosional rakyat tanpa kendali, yang mengarah pada situasi disintegrasi bangsa.

Pada tataran ini, masalah integrasi bangsa telah menjadi isu sentral, yang dapat mencabik-cabik persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai komponen bangsa yang berkiprah dalam konfigurasi sistem nasional, meskipun TNI mengambil jarak yang sama dengan komponen dan kekuatan politik yang ada (netralis),

---

\* Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo, Komandan Sesko TNI, Bandung

tidaklah menyurutkan tekad dan sikap TNI dalam menjaga integritas bangsa.

Melalui paradigma baru keperannya, TNI telah memposisikan dirinya melekat pada rakyat, artinya menjadikan orientasi kerakyatan inheren mewarnai sosok TNI. Adagium Kamanunggalan TNI-rakyat, tidak sekadar merupakan retorika tanpa makna, akan tetapi dalam tataran yang lebih praksis, dapat menjadi kekuatan ampuh bangsa dan negara dalam menepis berbagai ancaman, terutama yang mengancam integritas-negara Kesatuan RI, sebagaimana dibuktikan dalam proses awal kelahiran TNI maupun negara kesatuan Republik Indonesia.

### Arti Kerakyatan

Dalam pengertian yang paling sederhana, kerakyatan yang berasal dari kata rakyat diartikan sebagai hal-ikhwal yang berkaitan dengan rakyat. Dalam wujudnya yang riil, rakyat merupakan salah satu komponen dari negara, di samping tentunya pemerintah dan wilayah yurisdiksi.

Rakyat dari suatu negara, tidak terikat secara teritori, namun dengan seluruh masyarakat, warga bangsa, warga negara dan penduduk, sepanjang memiliki hubungan hukum dan politik, tetap dapat dikatakan sebagai

rakyat dari negara tersebut. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, terbitan Depdikbud 1988, kerakyatan dapat diartikan sebagai demokrasi dan kewarganegaraan.

Demokrasi mengarah pada arti politik, yang menggambarkan suatu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Sementara kewarganegaraan mengarah pada artian hukum, yakni sebagai basis-bekerjanya hukum positif (Satjipto Rahardjo, 1982).

Pada hekatiknya, TNI mempersepsikan, bahwa kerakyatan merupakan suatu totalitas rakyat berikut segenap penciriannya yang bersifat semesta dan memberikan legitimasi terhadap pemerintahan negara yang demokratis dalam kerangka supremasi hukum. Konsekuensinya, ciri-ciri kerakyatan dapat diidentifikasi sebagai entitas (keutuhan), menyeluruh (komprehensif), tidak terfragmentasi, populis, pemihakan kepentingan bersama, dan mengutamakan persatuan-kesatuan.

Dari ciri-ciri yang tergambar di atas, yang turut melekat pada sosok TNI, melalui paradigma baru keperannya, TNI menetapkan posisinya dalam wacana perpolitikan nasional.

Sikap netralis TNI merupakan kristalisasi orientasi kerakyatan pada TNI, dan sekaligus menjadi jawaban keberpihakan TNI

kepada rakyat.

### Sejarah kelahiran TNI

Berbeda dengan kebanyakan negara, terutama di Barat yang melahirkan berbagai teori kemiliteran, maka kelahiran TNI diawali oleh embrional lasykar dan himpunan kekuatan-kekuatan (bersenjata) rakyat yang dituntut untuk melawan penjajah Belanda dan sekutunya serta Jepang, dalam rangka merebut, mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Karena peningkatan tahapan kebutuhan, berkembanglah embryo-embrio tadi menjadi kekuatan bersenjata yang berstruktur dan sistematis.

Dari sini tampak, bahwa perubahan nama TNI dari BKR, TKR, TRI, TNI, ABRI dan sekarang TNI, sejak kelahirannya mengisyaratkan, bahwa TNI adalah anak kandung rakyat. Bersama rakyat dan kekuatan bersenjata lainnya (Polri), TNI baru-membahu dalam perjuangannya. Meskipun dalam artian bukan negara yang dibela, namun mudah disepakati, bahwa rakyatlah yang dibela, terutama dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam perjalanan sejarahnya, di samping telah berhasil menanggulangi berbagai pemberontakan bersenjata (DI/TII, PRRI, Permesta, RMS, Kahar Muzakar dan PKI), TNI juga te-

lah mampu mengembangkan *civic mission*-nya dalam penyelenggaraan negara.

Keberpihakan pada rakyat tetap dijadikan acuan, sehingga tidak sulit difahami jika TNI juga disebut sebagai tentara rakyat. Andaikata pada penghujung masa pemerintahan Orba terkesan adanya distorsi terhadap fungsi dan peran TNI, terutama dalam keberpihakannya terhadap salah satu golongan tertentu, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari format politik saat itu.

Namun haruslah diakui, bahwa paradigma baru peran TNI, telah meluruskan kembali perjalanan TNI dalam pengabdian-nya kepada negara dan bangsa, sebagai tentara rakyat.

### Hakikat integrasi bangsa

Hakikat integritas bangsa Indonesia adalah wujud kohesivitas segenap komponen bangsa di atas kesadaran sifatnya yang pluralistik, yang dibentuk melalui sosialisasi wawasan kebangsaan. Tuntutan atas terjaminnya integrasi bangsa, berangkat dari kondisi objektif negara dan bangsa yang majemuk dan terdiri dari berbagai pulau yang disatukan oleh laut.

Dari aspek geografis, terdiri dari pulau-pulau berjumlah 17.000 lebih, yang satu dengan yang lain disatukan oleh perairan nasional, sebahagian besar

penduduknya tinggal di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tentunya menurut kemampuan untuk mengolah dalam rangka kesejahteraan rakyat.

Dari aspek demografis, populasi menunjukkan keseragaman suku bangsa, etnis, agama dan bahasa. Adalah kemustahilan untuk menjadikan keseragaman demografis, karena di samping unsur perbedaannya cukup dominan, juga yang penting, langkah ke arah itu akan menjadi sia-sia. Bukankah kekayaan bangsa Indonesia adalah kemajemukan?

Pada satu sisi ciri bangsa Indonesia yang bhineka dan majemuk, memang merupakan sumber kekuatan bangsa, tentunya sepanjang proses sosialisasi ke-Indonesiaan terus digencarkan, terutama melalui penghayatan dan pengamalan substansi sumpah pemuda. Pada sisi lain, kemajemukan tersebut sangat rentan dengan kerawanan-kerawanan, terutama konflik etnis dan agama. Bahkan dikhotomi Jawa dan luar Jawa, Islam - non Islam dan lain-lain, yang acapkali dijadikan komoditi - politik, sesungguhnya sarat konflik dan *clash of civilization* (Huntington, 1986) bisa muncul dari kondisi

ini.

Sumpah pemuda, yang dideklarasikan pada tanggal 28 Oktober 1928, merupakan tali pengikat yang kokoh atas kemajemukan tersebut. Nilai dari semangat yang terpancar dari ungkapan satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air, Indonesia, pada dasarnya tetap perlu disosialisasikan hingga sekarang, bagi terwujudnya nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Sementara itu, lambang negara Bhineka Tunggal Ika sesungguhnya mencerminkan ketunggalan dalam kebhinekaan, yang pesan moralnya adalah rasa persatuan dan kesatuan. Dalam konteks menjamin integritas - bangsa, maka isu-isu politik yang terkuak pada era reformasi ini, seperti negara federasi, perlunya amandemen UUD 1945, penghapusan Dwifungsi TNI dan lain-lain, yang secara linier memang dapat mengusik integrasi bangsa, namun hendaknya dipandang secara lebih arif, sebagai wujud dinamika pemikiran politik dan kepedulian pada bangsa.

Satu hal yang tampaknya penting, adalah bagaimana integrasi bangsa tetap menjadi final, bagi upaya bangsa membangun Indonesia baru. Di sini kita melihat orientasi kerakyatan TNI dapat memberikan sumbangannya.

## Orientasi Kerakyatan TNI

Dalam rangka menjaga keutuhan integrasi bangsa orientasi kerakyatan TNI dihadapkan pada wacana perpolitikan nasional paska Pemilu 1999, yang dapat ditangkap sebagai cenderung integrasi kurang kondusif bagi kelanjutan proses demokratisasi. Ancaman internal justru menghadang bangunan integrasi bangsa. Beberapa fenomena politik yang menarik untuk disimak, antara lain:

1. Sikap partisan elit dan partal politik relatif terlalu menonjol. Terdapat gejala lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan golongan, tanpa mempedulikan kepentingan bangsa.
2. Kaum elit politik belum dewasa dalam berdemokrasi. Mereka kurang memiliki kesediaan untuk menerima kenyataan politik yang telah dihasilkan dan terkesan memaksakan kehendaknya masing-masing.
3. Budaya politik belum kondusif untuk menumbuhkembangkan iklim politik yang sehat. Tingginya mobilisasi sentimen mengalahkan rasionalitas yang kurang menguntungkan pendidikan politik masyarakat.

Orientasi kerakyatan TNI yang dihadirkan melalui netralitas sikap TNI dalam kehidupan politik, merupakan antisipasi yang

tepat dan proporsional terhadap munculnya fenomena politik saat ini. Keberpihakan pada rakyat, setidaknya mereduksir berbagai anggapan yang memberikan *trade mark* TNI sebagai komponen status quo. Sebagai komponen yang termasuk awal mereformasi dirinya, TNI yang tentara rakyat, menegaskan sikapnya. Di antara dimensi kekuatan yang dikandung TNI dan dapat disumbangkan dalam bidang integrasi bangsa adalah bahwa TNI merupakan salah satu komponen strategis bangsa yang secara sadar mendasarkan dirinya pada wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ini diwujudkan dalam berbagai kebijakan dan karakteristik organisasi, antara lain:

1. Rekrutmen dan pembinaan personil dalam tubuh TNI, dilaksanakan tanpa menyertakan suku, etnis, agama dan ras sebagai bahan pertimbangan.
2. Tugas dan peran TNI senantiasa mengacu pada kepentingan bangsa dan bukan golongan atau kelompok.
3. Penugasan satuan maupun perorangan dilaksanakan pada lingkup nasional tanpa mengenal batas-batas wilayah geografik maupun demografik.
4. Doktrin TNI senantiasa bersandar kepada kekuatan dan kemampuan peran rakyat

dalam tataran semesta, kerakyatan, dan kewilayahan.

Pernyataan bersejarah Panglima Besar Sudirman yang mengatakan bahwa TNI merupakan satu-satunya hak milik nasional yang masih utuh dan tidak berubah merupakan pernyataan filosofati yang memiliki makna sangat dalam dan mempunyai keberlakuan yang menjangkau hingga saat ini dan jauh ke masa depan dalam pengertian politik.

Bagi Indonesia yang bercirikan kebhinekaan, TNI yang berlandaskan wawasan kebangsaan, berciri nasional dan ditampilkan dalam organisasi struktur personalia maupun kebijakan memberikan nilai tambah yang dominan mempengaruhi prasyarat bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa sebagai wujud dari integrasi bangsa.

Dengan orientasi kerakyatan yang melekat padanya, TNI berupaya memerankan dirinya dalam memberikan kontribusi positif untuk menjaga keutuhan integrasi bangsa.

Terhadap ancaman retaknya geografis melalui pemisahan wilayah RI, serta persatuan dan kesatuan bangsa TNI tetap pada komitmennya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jika upaya tersebut dilakukan dengan tinda-

kan kekerasan, TNI akan memberikan responsnya dalam fungsi pertahanan keamanan.

Bila ancaman berada dan ber-sumber dalam bidang sosial TNI akan membantu Polri selaku aparat keamanan, juga secara proaktif lebih mendorong kehidupan yang demokratis, adil, sejahtera dan taat hukum. Itulah kontribusi TNI sebagai tentara rakyat dalam rangka menjaga keutuhan integrasi bangsa.

### Prospek dan Tantangan

Setelah mencermati orientasi kerakyatan TNI dalam bidang integrasi bangsa diawali secara kilas balik dalam dimensi sejarah hingga saat ini tiba saatnya kita mengantisipasi aktualisasinya ke masa depan. Satu hal yang dapat kita tarik pelajaran dari proses sejarah adalah bahwa segenap gejala dalam dimensi sejarah harus kita pandang secara utuh dalam nilai kontekstual. Oleh karenanya dalam mengadakan analisis kritis suatu gejala kita pun perlu mampu menangkap wujud nilai kontekstual dalam dimensi waktu terkait. Bila dikaitkan dengan subyek orientasi Kerakyatan TNI dan integrasi bangsa hendaknya tidak boleh kita lupakan bahwa kedua wujud tersebut tidak dapat kita pandang sebagai *taken for granted*. Kita perlu mampu membandingkan kondisi masa lalu,

masa kini dan masa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pemikiran ini prospek dan tantangan yang akan dihadapi oleh orientasi Kerakyatan TNI ini prospek dan tantangan yang akan dihadapi orientasi Kerakyatan TNI dalam bidang integrasi bangsa di masa mendatang dapat diuji melalui dan ditentukan oleh keadaan yang dilahirkan oleh jawaban atas pertanyaan berikut sebagai isu untuk didiskusikan:

1. Bagaimana ciri kerakyatan TNI dapat diaktualisasi dan diperankan di masa yang akan datang?
2. Siapa yang menentukan peran TNI dalam negara?
3. Dapatkah TNI otonom dan independen dalam negara?
4. Apa kewenangan TNI untuk menjaga keutuhan integritas bangsa?
5. Siapa yang dimaksud dengan rakyat?
6. Di mana posisi TNI antara presiden dan rakyat?
7. Apakah TNI sebagai tentara

rakyat mempunyai pengertian eksklusif dari konteks profesionalisme TNI?

8. Apa kriteria profesionalisme TNI?
9. Bagaimana hubungan sipil - militer dapat memberikan iklim kondusif bagi peran TNI dalam negara?

Segenap jawaban adalah sumbangan yang amat berharga bagi upaya memantapkan TNI yang bercirikan kerakyatan. Pembahasan singkat tentang orientasi kerakyatan TNI dalam bidang integrasi bangsa ini kami akhiri dengan usulan redefinisi bahwa orientasi kerakyatan TNI adalah kadar profesionalisme TNI dalam melaksanakan fungsi dan perannya sebagai bagian dari sistem nasional atas kesepakatan bangsa, menurut moral dan etika politik modern, dalam sistem politik dan manajemen nasional, yang mendukung kepentingan nasional dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.